
PESANTREN GENDER: KONSTRUKSI BARU BASIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Oleh : Abd. Halim Soebahar

Abstrak

Tema tentang pesantren tampaknya selalu aktual. Tercermin pada berbagai fokus pembicaraan, kajian dan penelitian yang dilakukan para ahli, terutama setelah semakin diakuinya kontribusi pesantren sebagai "sub kultur". Bahkan menjadi semakin menarik ketika keberadaan pesantren sebagai sub kultur dikaitkan dengan wacana gender dan pemberdayaan perempuan. Yang menjadi concern tulisan ini, karena dalam perjalanannya yang panjang pesantren ternyata telah mengalami proses dekonstruksi, bahkan rekonstruksi sehingga melahirkan konstruksi baru, kendati masih diterima secara kontroversial. Tulisan ini mencoba mendesain paradigma tentang konstruksi baru pesantren dimaksud, mula-mula tentang konstruksi pesantren, pengenalan pesantren dengan isu-isu perempuan, dan konstruksi baru pesantren sebagai basis pemberdayaan perempuan. Tentu saja, semuanya ini baru tahap eksploratif yang masih memerlukan kajian lebih lanjut.

Pendahuluan

Diskursus tentang pesantren sejak tiga dasawarsa terakhir semakin marak. Tercermin pada berbagai fokus pembicaraan, kajian dan penelitian yang dilakukan para ahli, terutama setelah semakin diakuinya kontribusi pesantren sebagai "sub kultur". Bahkan kini menjadi semakin menarik ketika keberadaan pesantren sebagai sub kultur dikaitkan dengan wacana gender dan pemberdayaan perempuan.

Menurut Wahid (1984: 10; 1993: 267) pesantren disebut "sub kultur" karena telah memiliki tiga unsur pokok yang membangun sub kultur pesantren: pola kepemimpinannya yang berdiri sendiri, literatur universal yang telah dipelihara selama berabad-abad, dan sistem nilainya sendiri yang terpisah dari sistem nilai yang dianut oleh masyarakat di luar pesantren.

Masalahnya, bagaimanakah konstruksi pesantren sebagai sub-kultur mengalami proses rekonstruksi menjadi pesantren gender? Pesantren Gender, bukan pesantren dalam pengertian biologis, dimana kiai dan santrinya

harus perempuan semua, atau harus laki-laki semua, tidak. Pesantren gender adalah pesantren yang mengembangkan visi pemberdayaan dan sensitif gender, sehingga dapat mencegah terjadinya diskriminasi, stereotyping, sub ordinasi, marginalisasi, dan simbol-simbol lain yang dapat merendahkan martabat jenis kelamin tertentu. Tipologi pesantren ini akan menjadi factor signifikan bagi keberhasilan program pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000.

Konstruksi Pesantren

Potensi dan posisi strategis pesantren, dalam sejarah mutakhir ternyata telah kepesantrenannya. Komponen-komponen konstruksi pesantren tersebut secara lebih detail dapat dipahami sebagai berikut:

Pola Kepemimpinan Pesantren

Dalam kehidupan pesantren, kiai bukan hanya pengasuh, tidak sedikit justru kiai adalah pemimpin dan

pendiri pesantren, sehingga kepemimpinan pesantren banyak diwarnai oleh kepribadian kiai. Hasil penelaahan literatur, belum ditemukan kajian mendalam menyangkut visi dan misi pesantren, kecuali telaah yang dilakukan Madjid (dalam Rahardjo, ed., 1985: 5) yang menegaskan bahwa kekurangan pertama pesantren ialah kurang jelasnya tujuan pendidikannya. Agaknya belum ada pesantren yang mampu secara sadar merumuskan tujuan pendidikannya dan menuangkannya dalam tahapan-tahapan rencana kerja atau program.

Mungkin kebutuhan kepada kemampuan itu relatif terlalu baru. Tetapi persoalannya ialah, tidak adanya perumusan tujuan itu disebabkan bahwa tampaknya tujuan diserahkan kepada proses improvisasi menurut perkembangan pesantren yang dipilih sendiri oleh seorang kiai atau bersama-sama pembantunya secara intuitif. Malahan pada dasarnya memang pesantren itu sendiri -dalam semangatnya- adalah kepribadian pendirinya. Maka tidak heran bila dalam hampir keseluruhan kasus, pesantren merupakan usaha pribadi atau individual enterprise.

Dalam banyak kasus, besarnya pengaruh kiai, telah menyebabkan kiai memiliki otoritas yang sangat besar, sehingga kiai selalu menjadi penentu kebijakan pesantren (P3M, 1996; Puan, 2001), bahkan, kiai disebut juga sebagai *murobbi ar-ruh* (Pembimbing spiritual) di pesantren, dan itu bisa dinikmati oleh masyarakat pesantren dan kiai sendiri. Kajian tentang Kepemimpinan Kyai (Arifin, 1993) berhasil mendeskripsikan bahwa sekalipun komunitas pesantren merupakan komunitas yang bersifat arkais yang memiliki sistem tertutup (*closed system*), tetapi mereka bukanlah komunitas yang statis. Hurgronje

(dalam Dhofier, 1984) menyatakan bahwa sekalipun Islam di Jawa kelihatan begitu statis dan begitu terbelenggu oleh pikiran-pikiran ulama di abad pertengahan, sebenarnya telah mengalami perubahan-perubahan yang sangat fundamental. Perubahan fundamental itu sendiri setidaknya terlihat pada terjadinya pergeseran pola pandang dan pola pikir diantara komunitas pesantren tentang segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan eksistensi mereka.

Selama ini, yang termasuk dalam warga pesantren adalah kiai (ajengan, nun, atau bendara) yang menjadi pengasuh, para guru (ustadz, bentuk ganda *asatidz*), dan para santri. Kepengurusan pesantren ada kalanya berbentuk sederhana, di mana kiai memegang pimpinan mutlak dalam segala hal, sedangkan kepemimpinannya itu seringkali diwakilkan kepada seorang ustadz senior selaku "lurah pondok". Dalam pesantren yang telah mengenal bentuk organisatoris yang lebih kompleks, peranan "lurah pondok" ini digantikan oleh peranan pengurus, lengkap dengan pembagian tugas masing-masing, walaupun ada kalanya ketuanya masih dinamai "lurah" juga. Walaupun telah dibentuk pengurus yang bertugas melaksanakan sesuatu yang berhubungan dengan jalannya pesantren sehari-hari, kekuasaan mutlak senantiasa masih berada di tangan sang kiai. Oleh karena itu, betapa demokratis sekalipun susunan pimpinan di pesantren, masih terdapat jarak yang tak terjembatani antara kiai serta keluarganya di satu pihak dan para *asatidz* dan santri di pihak lain, kiai bukan primus inter pares, melainkan bertindak sebagai pemilik tunggal (*directeur eigenaai*) (Wahid, 2001: 12).

Kedudukan ustadz memiliki dua fungsi pokok: sebagai latihan

penumbuhan kemampuannya untuk menjadi kiai di kemudian hari dan sebagai pembantu kiai dalam mendidik para santri. Di dalam menunaikan fungsi yang pertama, ia mulai diperkenalkan kepada masyarakat di luar pesantren dalam bentuk bermacam-macam, minimal dalam meladeni para orang tua santri dan tamu yang berkunjung ke pesantren. Dalam fungsi ini ia belajar melakukan peranan sebagai asimilator antara tata nilai yang telah ada dan "radiasi" kultural yang baru. Sebagai pembantu kiai, ia diharuskan memantapkan penguasaannya atas literatur keagamaan yang diajarkan di pesantren. Kedua tugas sebagai calon asimilator budaya dan ahli dalam ilmu pengetahuan agama ini adalah tugas yang sangat berat, terlebih lagi ia senantiasa berada di bawah pengawasan kiai, yang biasanya adalah seorang perfeksionis dalam kedua hal itu. Tidak heran jika rata-rata para asatidz yang dianggap berhak dan mampu mendirikan pesantren sendiri berjumlah sangat kecil untuk tiap angkatan. Seorang kiai ternama yang telah berumur enam puluh tahun dan memimpin pesantrennya selama tiga puluhan tahun, dapat berbangga hanya dengan dua puluh orang bekas santrinya yang dapat menjadi kiai dan mendirikan pesantren masing-masing. Dilihat dari sudut ini, pesantren sebenarnya berwatak elitis dengan angka putus sekolah (drop out) yang sangat besar. Semenjak penyerahan kedaulatan, gejala ini dianggap mengalami perubahan, dengan semakin longgarnya ukuran yang dikenakan pada para asatidz untuk dapat dianggap "lulus sepenuhnya dari perguruan" (Wahid, 2001: 15).

Santri adalah siswa yang tinggal di pesantren, guna menyerahkan diri. Ini merupakan persyaratan mutlak untuk memungkinkan dirinya menjadi anak

didik kiai dalam arti sepenuhnya. Dengan kata lain, ia harus memperoleh kerelaan sang kiai dengan mengikuti segenap kehendaknya dan melayani segenap kepentingannya. Pelayanan harus dianggap sebagai tugas kehormatan yang merupakan ukuran penyerahan diri itu. Kerelaan kiai ini, yang dikenal di pesantren dengan barakah, adalah alasan tempat berpijak si santri di dalam menuntut ilmu. Dengan tekanan pada kebutuhan memperoleh kerelaan kiai inilah diciptakan mekanisme konsensus dalam pembentukan tata nilai di pesantren. Status sebagai seorang santri di pesantren, dengan demikian memiliki fungsi sebagai medium guna menciptakan ketundukan pada tata nilai yang berlaku di pesantren itu sendiri. Oleh karena itu, tidaklah tepat untuk menggunakan istilah drop out bagi para santri yang tidak menyelesaikan pelajaran di pesantren dan tidak mampu mendirikan pesantren sendiri.

Kurikulum Pesantren

Kurikulum pesantren, sering disebut dengan kitab kuning, atau literatur universal yang telah dipelihara selama berabad-abad. Dalam konteks pemberdayaan perempuan, kurikulum menjadi concern banyak ahli, karena literatur tentang perempuan yang dirumuskan sejak lama itu dinilai bias gender. Hasil telaah Mas'udi menunjukkan bahwa kesan kitab kuning terhadap perempuan negatif. Hal itu bisa dimengerti karena kita melihatnya dengan kaca mata sekarang, kaca mata modernisme barat, yang penuh tuntutan persamaan hak pria-wanita (Mas'udi dalam Marcoes dan Moeleman, 1993). Secara garis besar kitab kuning telah menempatkan perempuan berada di bawah laki-laki.

Hal itu banyak faktornya. Pertama, ajaran al-Qur'an dan Hadits Nabi memang tidak mensejajarkan perempuan dan lelaki, sekurang-kurangnya sebagaimana diobsesikan oleh para penganjur emansipasi kaum wanita masa kini. Kedua, para penulis kitab kuning hampir semuanya adalah lelaki. Bias kelelakian menjadi sulit dihindari. Ketiga, kitab kuning adalah produk budaya zamannya, zaman pertengahan Islam yang didominasi oleh cita-cita budaya Timur Tengah yang secara keseluruhan sangat dipengaruhi oleh pemikiran patrilineal (Mas'udi, 1993).

Soebahar dan Utsman (1999) mendeskripsikan empat kitab teks yang disajikan di beberapa pesantren, khususnya di Madura yang praktek pembelajarannya sering bias gender, yaitu kitab *Uqûdul Lujain* (edisi cetak ulang, 1975) karya Syekh Nawâwî Banten, *Ash-Shilâh Fî Bayân-Nikâh* (1406H) karya Syekh Muhammad Kholil Bangkalan, *Syarah dan terjemah Uqûdul Lujain* (1995) karya Kiai Thoifûr Ali Wafâ, dan kitab *Adâb al-Marâh*. Keempat kitab teks yang sudah sekian lama disajikan di pesantren tersebut oleh banyak ahli mulai di dekonstruksi, dan telah menghasilkan karya-karya rekonstruksi.

Karya-karya rekonstruktif sebagai hasil dari proses rekonstruksi telah dipublikasikan oleh para ahli, seperti karya Mas'ûdi tentang Islam dan hak-Hak Reproduksi Perempuan: *Dialog Fiqih Pemberdayaan* (FF dan Mizan, 1999), Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, dkk. *Tentang Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab Uqudul Lujain* (FF, FK3, dan LKiS, 2001) M. Akhsanuddin dan kawan-kawan tentang *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren* (YKF dan FF, 2002).

Sistem Nilai Kepesantrenan

Di Pesantren, sistem nilai kepesantrenan terpisah dari sistem nilai yang dianut oleh masyarakat di luar pesantren. Menurut Wahid, berdasarkan kepatuhan harfiyah terhadap ajaran agama dalam menjalani kehidupan nyata, sistem nilai itu tidak bisa dilepaskan dari unsur-unsur utama lainnya, yaitu kepemimpinan kiai dan literatur universal. Pembakuan ajaran-ajaran Islam tentang kehidupan sehari-hari bagi kiai dan santri melegitimasikan dua hal, yaitu kitab-kitab sebagai sumber tata nilai dan kepemimpinan kiai sebagai model dari implementasinya dalam kehidupan nyata, sebagai jalur utama dari sistem nilai. Sistem nilai itu memainkan peranan penting dalam membentuk kerangka kemasyarakatan dari keinginan warga pesantren terhadap masyarakat pada umumnya (Wahid, 1988: 269).

Pertanyaan yang sangat penting adalah bagaimana mengembangkan ketiga unsur utama pesantren itu tanpa perubahan mendasar terhadap kekayaan kulturalnya yang telah terbukti bermanfaat ke dalam unsur-unsur kemajuan baru yang sepadan dengan masa depan pesantren. Independensi pesantren yang relatif dari campur tangan yang sama sekali eksternal dalam skala massif memberikan ruangan untuk melakukan manuver yang diperlukan untuk bereksperimen.

Perkenalan Pesantren dengan Isu-isu Perempuan

Bukti paling jelas betapa isu perempuan ini menarik adalah didirikannya Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (disingkat: P3M) oleh para kiai se-Indonesia di Jakarta (18/05/1983), dengan struktur kepemimpinan

laki-laki. Baru 8 tahun terakhir perempuan masuk di jajaran staf pengambil keputusan. Secara arif hal ini barangkali bisa dibaca bahwa P3M memang mencerminkan realitas yang terjadi dalam dunia pesantren. Lembaga pendidikan pesantren yang sudah berdiri sejak ratusan tahun yang lalu, seluruhnya adalah dunia lelaki. Baru belakangan ini, kira-kira 40-50 tahun ini muncul pesantren-pesantren putri dimana-mana.

Keberadaan pesantren putri memang fenomena yang belum lama. Menurut catatan sejarah, pesantren putri pertama diadakan di Denanyar atas usul KH. Bisri Syansuri tahun 1923. Atas gagasan tersebut, pada mulanya Hadratus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari sendiri kurang berkenan. Sehingga ketika KH. Hasyim Asy'ari datang berkunjung ke pesantren KH. Bisri Syansuri, konon untuk sementara para santri putrinya terpaksa disembunyikan. Tak lama kemudian KH. Hasyim Asy'ari sendiri setuju dengan jalan yang ditempuh oleh KH. Bisri Syansuri. Bahkan anak perempuannya sendiri, Nyai Khoiriah Hasyim dikirimkan ke Tanah Suci Makkah untuk mondok. Tetapi persetujuan beliau itu malah menimbulkan kontroversi sampai pada akhirnya hampir semua pesantren di Jawa dan Madura menerima ruang bagi santri putri menuntut ilmu di pesantren (Natsir dan Hasyim, 1997: 10-11).

Meskipun keberadaan pesantren putri terbilang baru, namun eksistensi pesantren putri relatif mapan. Bahkan menurut perhitungan kasar, jumlah santri putri relatif lebih banyak dibandingkan santri putra. Hal ini mungkin disebabkan karena kesadaran akan pentingnya pendidikan telah muncul di kalangan umat Islam pedesaan dari mana kebanyakan santri putri itu berasal, di lain pihak biaya

pendidikan di luar pesantren relatif mahal.

Pada tahun 1994, P3M mulai berkenalan dengan program perempuan. Kegiatan ini diawali dengan kegiatan Latihan Kesadaran Gender yang dilaksanakan di beberapa pesantren, yakni: (1) PP. Maslakul Huda, Kajen, Pati Jawa Tengah (2) PP. Balerante, Cirebon, dan (3). PKP, Cibubur. Sebagian besar peserta adalah santri senior atau pengajar di pesantren yang merangkap aktivis Organisasi Perempuan Indonesia.

Dari tiga kali pelatihan, ternyata banyak diperoleh pengalaman menarik, karena, persoalan perempuan merupakan hal yang seakan musykil kalau dihadapkan dengan bangunan fiqh yang ada. Dalam wacana fiqh yang dikenal ada 3 pengelompokan, yakni fiqh ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Sang Pencipta, ahwal asy-syakhsiyyah, atau hukum privat, dan fiqh muamalah.

Persoalan perempuan itu biasanya dibahas dalam rumpun ahwal asy-syakhsiyyah, hukum privat. Seperti halnya fiqh ubudiyah, ahwal asy-syakhsiyyah ini cukup kuat segelnya. Ia dianggap sebagai rumpun kajian yang sebaiknya tidak diutak-atik lagi. Berbeda dengan bidang muamalah, yaitu hubungan perdata yang relatif terbuka untuk masuknya penafsiran baru sesuai dengan perubahan zaman, ahwal asy-syakhsiyyah tempat dimana persoalan perempuan dikategorikan kedalamnya, sedemikian rupa tertutupnya. Dengan kata lain, mempertanyakan "fiqh perempuan", bukan saja akan dipandang sebagai mempertanyakan bangunan fiqh, melainkan juga mempertanyakan asumsi-asumsi teologis yang menjadi landasan aqidah dan fiqh.

Langkah selanjutnya berayun, atas

mengambil inisiatif merancang program pemberdayaan hak-hak perempuan khususnya hak reproduksi. Oleh karena basis aktivitas P3M adalah pesantren, maka program advokasi hak-hak reproduksi ini pun di kembangkan di pesantren-pesantren terutama di Jawa dan program Fiqh an-Nisâ' ini bukan hanya membahas mengenai fiqh yang diperuntukkan bagi kaum perempuan, akan tetapi fiqh-fiqh yang dikembangkan oleh kaum perempuan sendiri didasarkan pada cara pandang dan kebutuhan perempuan.

Konstruksi Baru Pesantren, Basis Pemberdayaan Perempuan

Jika deskripsi terdahulu disepakati, bahwa munculnya kategorisasi baru pesantren secara sosiologis menandai terjadinya proses rekonstruksi pesantren. Masalahnya, bagaimanakah proses interaksi yang intens antara dunia pesantren yang dikenal "patriarkhal" dengan gaung pemberdayaan perempuan yang baginya masih dipandang kontroversial?. Secara historis, sebenarnya sejak lama sebagian pesantren menaruh peduli terhadap upaya-upaya pemberdayaan. Namun era yang menandai concern pesantren lebih terfokus pada upaya-upaya pemberdayaan perempuan adalah setelah para kiai dan pengasuh pesantren se Indonesia mendirikan P3M di Jakarta (18/05/1983), sebagian diantaranya kemudian mendirikan Yayasan Rahima (Jakarta, 11/09/2000) dan Puan Amal Hayati (Jakarta, 03/07/2001).

Dengan dukungan The Ford Foundation, P3M mengembangkan program "Fiqh Perempuan" (fiqh an-nisâ') yang secara intens melakukan kajian, training, publikasi, dan upaya-upaya pemberdayaan perempuan yang berbasis di pesantren, dan dalam

rentang waktu 2 tahun P3M telah berhasil membentuk 7 LSM perempuan yang berbasis di pesantren. Ketujuh LSM inilah yang pada akhirnya mengkoordinasi ulama-ulama perempuan potensial yang tersebar di banyak pesantren, majelis ta'lim, dan organisasi kemasyarakatan di wilayah karesidenan masing-masing, seperti: Angkatan I di Yogyakarta, Angkatan II di Tasikmalaya Jawa Barat, Angkatan III di Jakarta, Angkatan IV di Jember, Angkatan V di Pandeglang Banten, Angkatan VI di Madura, dan Angkatan VII di Pati. Antara P3M dan ketujuh LSM perempuan yang berbasis di pesantren tersebut terjalin kemitraan yang dimediasi melalui Bulletin Sehat, Halqah, dan KABAR. Selain itu, pasok buku-buku pemberdayaan perempuan dan dokumentasi P3M gencar dipublikasikan.

Selanjutnya, ketika dirintis Yayasan Rahima (Jakarta, 11/09/2000) dan Puan Amal Hayati (Jakarta, 03/07/2001), maka tekad pesantren merespon upaya-upaya pemberdayaan perempuan kian intens. Rahima yang dikokohkan melalui Notaris Dr. H. Erwal Gwang, SH Nomor 2 Tahun 2000 bertujuan mendorong terciptanya suatu diskursus baru di kalangan masyarakat, khususnya di lingkungan masyarakat Islam yang lebih menggaris bawahi prinsip-prinsip keadilan bagi kaum perempuan melalui penegakan hak-hak mereka sebagai prasyarat terwujudnya demokratisasi dalam masyarakat (Rahima Profile, Website: www.rahima.or.id).

Khusus menyangkut komunitas pesantren, kegiatan Rahima mengarah pada penataan dan pengelolaan pesantren yang lebih sensitif gender, kegiatannya berupa merancang ulang dan mensosialisasikan sistem pengajaran pesantren yang sensitif gender; dan melakukan gerakan

penyadaran gender untuk para pengelola pesantren (pengurus dan staf pengajar) dan para santri. Untuk eksternal pesantren, berupaya meningkatkan kesadaran gender dan hak perempuan pada pimpinan majelis taklim, mubaligh - mubalighah sebagai rekan kerja pesantren yang merupakan ujung tombak syiar Islam ke masyarakat, kegiatannya berupa pelatihan gender dan hak-hak perempuan; dan pasok informasi tentang isu perempuan dan Islam dalam perspektif gender secara rutin.

Selanjutnya, Puan (Pesantren Untuk Pemberdayaan Perempuan) yang bertujuan menjadikan pesantren sebagai basis gerakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan guna mewujudkan masyarakat yang terbebas dari kekerasan berdasarkan prinsip-prinsip moral, agama, dan kemanusiaan. Untuk itu, Puan melakukan serangkaian usaha pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dengan menjadikan pesantren sebagai basis gerakan dan motor penggeraknya (Profil Puan, 2001). Selain itu, ada 5 agenda utama kegiatan Puan, salah satu diantaranya mengupayakan terselenggaranya sistem pendidikan pesantren yang tidak bias gender.

Kini, sedikitnya ada 7 pesantren yang menaruh peduli mengupayakan sistem pendidikan pesantren yang tidak bias gender, sebagian besar adalah rintisan P3M, yang kemudian dilanjutkan Rahima, dan kini telah menjadi rekan kerja Puan (Pesantren untuk Pemberdayaan Perempuan), yaitu: (1) PP. Aqidah Usmuni, Sumenep Madura; (2) PP. Nurul Islam, Jember-Jawa Timur; (3) PP. Dar at-Tauhid, Cirebon-Jawa Barat; (4) PP. Sabilul Hasanah, Palembang-Sumatera Selatan; (5) PP. Al-Furqon, Perbalingga Jawa Tengah; (6) PP. Nahdlatul Wathan,

Lombok Mataram; dan (7) PP. At-Thahiriyyah, Jakarta (Profil Puan, 2001). Sebagai rekan kerja, besar kemungkinan sub kultur di ketujuh pesantren tersebut akan mengalami proses rekonstruksi. Hal ini dapat terjadi karena akses informasi, komunikasi, dan interaksinya menjadi kian meluas.

Bahkan, sejak tahun 1995 di pesantren tersebut telah dijadikan forum bagi banyak tokoh populer pemberdayaan perempuan, seperti saja: Drs. KH. Masdar F. Mas'udi, MA., KH. Husein Muhammad, Lc., Dr. Rosalia Sciortino, MA., Dra. Lies Marcoes Natsir, MA., Dra. Hj. Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, M.Hum., Drs. Syafiq Hasyim, MA., Dra. Badriyah Fayumi, MA, dan sebagainya.

Kajian, pemahaman, dan pandangan yang dikembangkan para tokoh tersebut di forum yang "dibuat" pesantren akan berpengaruh terhadap pengembangan wacana di pesantren. Bukan mustahil jika hal itu tidak sebatas wacana melainkan akan berkembang memformat ulang pola kepemimpinan kiai, kurikulum pesantren, sistem nilai kepesantrenan, dan akan berpengaruh terhadap variabel lain. Artinya, akan muncul kontruksi baru pesantren, yaitu "Pesantren Gender".

Penutup

Bertitik tolak dari deskripsi tersebut tampaknya gaung wacana pemberdayaan perempuan menjadi semakin keras karena persoalannya sangat kompleks. Namun demikian, seperti dikemukakan Darwin (1999: 6) meskipun gugatan terhadap subordinasi dan marginalisasi perempuan oleh laki-laki telah disuarakan dengan lantang, dominasi laki-laki di berbagai sektor masyarakat tetap tak tergoyahkan. Tampaknya suara kaum perempuan itu kurang

keras gaungnya di telinga laki-laki, bahkan barangkali di telinga kaum perempuan sendiri. Secara statistik, mungkin lebih banyak perempuan yang tidak begitu "concern" pada kesetaraan gender dibanding yang memperjuangkannya.

Daftar Pustaka

- Arifin, Imron, 1993, *Kepemimpinan Kyai: Kasus Pondok Pesantren Tebuireng*, Malang: Kalimasahada Press.
- Daandeka, 2001, "Menuju Pendidikan Islam Berkeadilan Gender", dalam *Swara Rahima*, No. 3 Th I Nopember, Jakarta: Yayasan Rahima.
- Darwin, Muhadjir, 1999, "Maskulinitas: Posisi Laki-laki dalam Masyarakat Patriarkhis", Makalah Seminar PPK UGM, Yogyakarta, 24 Juni.
- Dhofier, Zamakhsyari, 1982, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES.
- Horikoshi, Hiroko, 1987, *Kyai dan Perubahan Sosial*, Jakarta: P3M.
- Ikhsanuddin, M, Mohammad Najid, Sri Hidayati, eds., 2002, *Panduan pengajaran Fiqh di Pesantren*, Yogyakarta: Kerjasama Yayasan Kesejahteraan Fatayat dan Ford Foundation.
- Madjid, Nurcholish, 1985, "Merumuskan Kembali Tujuan Pendidikan Pesantren", dalam *Rahardjo, M. Dawam, ed., 1985, Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun dari Bawah*, Jakarta: P3M.
- MD. Mukhotib b, ed., 2002, *Ketika Pesantren Membincang Jender*, Yogyakarta: Kerjasama Yayasan Kesejahteraan Fatayat dan Ford Foundation.
- Natsir dan Hasyim, 1997, *P3M dan Program Fiqh an-Nisâ' Untuk Penguatan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Tahun 1995-1997*, Jakarta: P3M dan The Ford Foundation.
- Nuriyah, Shinta, et al., 2001, *Wajah baru Relasi Suami-Istri: Telaah Kitab Uqûd al-Lujayn*, Jakarta: The Ford Foundation, FK3, dan LkiS.
- Soebahar, Abd. Halim, 1998, *Pandangan Kyai Terhadap Masa Depan Industrialisasi di Madura*, Jakarta: Diperta Depag RI.
- Soebahar, Abd. Halim dan Hamdanah Utsman, 1999, *Pandangan Kiai Tentang Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Yogyakarta: Kerjasama PPK UGM dan The Ford Foundation.
- Suryadi, Ace, 2002, "Perempuan Indonesia dalam Peta Pendidikan", dalam *Agama & Jender News*, Edisi 12/ TH.IV/III/2002.
- Wahid, Abdurrahman, 1984, *Bunga Rampai Pesantren*, Jakarta: CV. Dharma Bhakti.
- Wahid, Abdurrahman, 1987, "Benarkah Kyai Membawa Perubahan Sosial?: Sebuah Pengantar", dalam *Hiroko Horikoshi, 1987, Kyai dan Perubahan Sosial*, Jakarta: P3M.
- Wahid, Abdurrahman, 2001, *Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren*, Yogyakarta: LKIS.
- Wahid, Abdurrahman, 1988, "Prospek Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan", dalam *Oepen, manfred dan Wolfgang Karcher Dinamika Pesantren: Dampak Pesantren Dalam Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat*, Jakarta: P3M.
- Rahima Profile, Website: HYPERLINK "<http://www.rahima.or.id>" www.rahima.or.id
- Zainab, Siti, 2002, *Nyai, Kiai, dan Pesantren*, Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat dan The Ford Foundation.